

Edisi Kedua

PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN OBAT



AN DIGITAL
KALTENG
S Palangka Raya

8
0

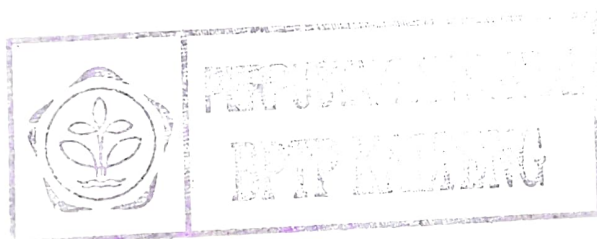


Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
2007

No. 10. Juli
Tgl. 10/07/09
Dik. 10/07/09
H
109/07/09/09
09/07/09
H
462188

PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TANAMAN OBAT

Edisi Kedua



633.88

BAD

P



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian
2007





**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN
MENTERI PERTANIAN**

Atas perkenan dan ridho Allah subhanahuwata'ala, seri buku tentang prospek dan arah kebijakan pengembangan komoditas pertanian edisi kedua dapat diterbitkan. Buku-buku ini disusun sebagai tindak lanjut dan merupakan bagian dari upaya mengisi "Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan" (RPPK) yang telah dicanangkan Presiden RI Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Juni 2005 di Bendungan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Propinsi Jawa Barat. Penerbitan buku edisi kedua ini sebagai tindak lanjut atas saran, masukan, dan tanggapan yang positif dari masyarakat/pembaca terhadap edisi sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2005. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Keseluruhan buku yang disusun ada 21 buah, 17 diantaranya menyajikan prospek dan arah pengembangan komoditas, dan empat lainnya membahas mengenai bidang masalah yaitu tentang investasi, lahan, pasca panen, dan mekanisasi pertanian. Sementara 17 komoditas yang disajikan meliputi: tanaman pangan (padi/beras, jagung, kedelai); hortikultura (pisang, jeruk, bawang merah, anggrek); tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet, tebu/gula, kakao, tanaman obat, kelapa, dan cengkeh); dan peternakan (unggas, kambing/domba, dan sapi).

Sesuai dengan rancangan dalam RPPK, pengembangan produk pertanian dapat dikategorikan dan berfungsi dalam: (a) membangun ketahanan pangan, yang terkait dengan aspek pasokan produk, aspek pendapatan dan keterjangkauan, dan aspek kemandirian; (b) sumber perolehan devisa, terutama terkait dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di pasar internasional; (c) penciptaan lapangan usaha dan pertumbuhan baru, terutama terkait dengan peluang

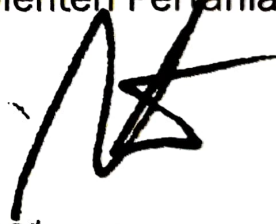
pengembangan kegiatan usaha baru dan pemanfaatan pasar domestik, dan (d) pengembangan produk-produk baru, yang terkait dengan berbagai isu global dan kecenderungan perkembangan masa depan.

Sebagai suatu arahan umum, kami harapkan seri buku tersebut dapat memberikan informasi mengenai arah dan prospek pengembangan agribisnis komoditas tersebut bagi instansi terkait lingkup pemerintahan pusat, instansi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, dan sektor swasta serta masyarakat agribisnis pada umumnya. Perlu kami ingatkan, buku ini adalah suatu dokumen yang menyajikan informasi umum, sehingga dalam menelaahnya perlu disertai dengan ketajaman analisis dan pendalaman lanjutan atas aspek-aspek bisnis yang sifatnya dinamis.

Semoga buku-buku tersebut bermanfaat bagi upaya kita mendorong peningkatan investasi pertanian, khususnya dalam pengembangan agribisnis komoditas pertanian.

Jakarta, Juli 2007

Menteri Pertanian



Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS

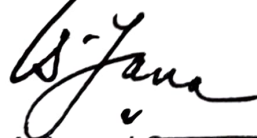
KATA PENGANTAR

Sasaran visi *"Indonesia Sehat 2010"*, adalah mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah meningkatkan cara pengobatan tradisional yang berkelanjutan dan bermanfaat baik, secara tersendiri maupun terpadu dalam jaringan pelayanan kesehatan paripurna.

Peningkatan peran tanaman obat khususnya, dan obat bahan alam umumnya, memerlukan: 1) Dukungan dan kemauan politik yang cukup dari pemerintah untuk menjadikan tanaman obat sebagai salah satu sumber kesejahteraan rakyat dan **"prime mover"** perekonomian nasional; 2) Adanya program menyeluruh dan terpadu dari hulu hingga hilir untuk pengembangan tanaman obat; 3) Koordinasi dan sinkronisasi program dari instansi terkait serta keterlibatan swasta dan masyarakat; dan 4) Peraturan perundang-undangan yang cukup kondusif bagi pengembangan tanaman obat.

Sejalan dengan itu, tulisan ini yang memuat prospek dan arah pengembangan agribisnis tanaman obat unggulan, memberikan arah dalam menggerakkan usaha pengembangannya yang berbentuk peluang investasi dalam usaha agribisnis tanaman obat.

Jakarta, Juli 2007
Kepala Badan Litbang Pertanian



Dr. Ir. Achmad Suryana

TIM PENYUSUN

- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Achmad Suryana
Kepala Badan Litbang Pertanian
- Ketua : Dr. Bambang Prastowo
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Perkebunan
- Anggota : Dr. Ir. Moch Syakir, MS
Dr. Syafril Kemala
Dr. Oti Rostiana
Dr. Molide Rizal
Drs. Mono Rahardjo, MS
Dra. Sri Yulianti
Ir. Sugiharto, MS

Badan Litbang Pertanian

Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu
Jakarta Selatan

Telp. : (021) 7806202

Faks. : (021) 7800644

Em@il : kabadan@litbang.deptan.go.id

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Jl. Tentara Pelajar No.1, Bogor, 16111

Jawa Barat

Telp. : (0251) 313083

Faks. : (0251) 336194

Em@il : criec@indo.net.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia memiliki ketergantungan yang besar terhadap obat dan bahan baku obat konvensional impor yang nilainya mencapai US\$ 160 juta per tahun, sehingga perlu dicarikan substitusinya dengan produk industri dalam negeri. Sementara itu, tren masyarakat konsumen dunia yang menuntut pangan dan produk kesehatan yang aman dengan slogan "*back to nature*" dan meninggalkan rokok, juga menunjukkan pertumbuhan pesat, termasuk di Indonesia sendiri.

Pengembangan obat bahan alam khas Indonesia yang dikenal sebagai "*jamu*", dimana tanaman obat menjadi komponen utamanya, memiliki arti strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan kemandirian Indonesia di bidang kesehatan. Dalam konteks demikian, pengembangan tanaman obat juga menjadi penting dalam program "*Revitalisasi Pertanian*" yang dicanangkan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi.

Dewasa ini peran tanaman obat khususnya, dan obat bahan alam umumnya, dalam pelayanan kesehatan formal di Indonesia sekaligus sebagai sumber devisa maupun PDB di Indonesia masih rendah. Hal itu disebabkan karena: (1) belum adanya dukungan dan kemauan politik yang cukup dari pemerintah untuk menjadikan tanaman obat sebagai salah satu sumber kesejahteraan rakyat dan "*prime mover*" perekonomian nasional; (2) belum adanya program menyeluruh dan terpadu dari hulu hingga hilir untuk pengembangan tanaman obat; (3) kurangnya koordinasi dan sinkronisasi program dari instansi pemerintah, swasta dan litbang, sehingga program yang ada menjadi kurang terarah, kurang efektif dan kurang efisien; dan (4) peraturan perundang-undangan yang ada belum cukup kondusif bagi pengembangan tanaman obat.

Berdasarkan klaim khasiat yang dimilikinya, jumlah serapan oleh industri obat tradisional (IOT), jumlah petani dan tenaga yang terlibat, prospek pengembangan dan tren investasi ke depan, lima komoditas tanaman obat yang potensial untuk dikembangkan adalah temulawak, kunyit, kencur, jahe dan purwoceng.

Temulawak, kunyit, kencur dan jahe adalah kelompok tanaman rimpang-rimpangan (*Zingiberaceae*), yang digunakan dalam hampir semua produk obat tradisional (*jamu*) karena paling banyak diklaim sebagai

penyembuh berbagai penyakit yang menjadi tren masyarakat modern (degeneratif, penurunan imunitas, penurunan vitalitas). Sedangkan purwoceng sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komplemen dan substitusi ginseng impor, sehingga dapat menghemat devisa negara.

Produk yang dapat dihasilkan dari tanaman temulawak, kunyit, kencur dan jahe adalah produk setengah jadi (simplisia, pati, minyak, ekstrak), produk industri (makanan/minuman, kosmetika, farmasi, Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) dan Industri Obat Tradisional (IOT), dan produk jadi (sirup, instan, bedak, tablet dan kapsul). Sedangkan untuk purwoceng, produk setengah jadi berupa simplisia dan ekstrak, produk industri dalam bentuk jamu seduh, minuman kesehatan (IKOT/IOT), dan pil atau tablet/kapsul (Farmasi).

Temulawak, kunyit, kencur dan jahe mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap PDB nasional, masyarakat petani dan industri. Setiap tahun, masing-masing komoditas ini mengalami peningkatan produktivitas untuk temulawak 11%, kunyit 28%, kencur 52% dan jahe 2,3%. Pengolahan dan diversifikasi produk primer (rimpang) menjadi produk sekunder (simplisia) mempunyai nilai tambah sebesar 7–15 kali, sedangkan pengolahan dari rimpang menjadi ekstrak memberikan nilai tambah sebesar 80–280 kali. Sementara itu, potensi purwoceng sebagai afrodisiak dapat tercermin dari begitu banyaknya ragam dan maraknya bisnis produk sejenis di pasaran dewasa ini.

Pasar yang menyerap produk agribisnis hulu dan hilir tanaman obat adalah 1.023 perusahaan industri obat tradisional (IOT) yang terdiri dari 118 IOT (aset > Rp. 600 juta) dan 905 IKOT (industri kecil obat tradisional, aset < Rp. 600 juta) yang bersama industri farmasi rata-rata menyerap sebesar 63%, ekspor 14%, dan untuk konsumsi rumah tangga 23%.

Kurang lebih 85% dari kebutuhan bahan baku untuk IOT dan IKOT masih diperoleh dari upaya penambangan hutan dan pekarangan tanpa upaya budidaya khusus. Pada saat ini, 97% IOT berada di Pulau Jawa (DKI Jaya, Jabar, Jateng dan Jatim), demikian pula 73% IKOT juga berada di Pulau Jawa, hanya 23% diluar Jawa. Laju pertumbuhan IOT (6,40% per tahun) lebih tinggi dari laju pertumbuhan IKOT (1,8% per tahun).

Dalam waktu 6 tahun (2005-2010), diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan bahan baku dari keempat komoditas tersebut, terutama jahe, sehingga terbuka peluang untuk intensifikasi dan/atau ekstensifikasi seluas 10–15% dari areal yang tersedia saat ini.

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan tanaman obat adalah rendahnya produktivitas dan mutu serta harga produk-produk primer, ketidakpastian pasar bagi produk tanaman obat yang dihasilkan petani, dan juga lemahnya modal dan daya tawar petani.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengembangan tanaman obat diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan baku dan peningkatan nilai tambah komoditas temu-temuan dan purwoceng.

Hal tersebut dapat dicapai melalui pemanfaatan varietas/ klon unggul, pengembangan di daerah yang sesuai, budidaya dengan penerapan praktek pertanian yang baik (*Good Agricultural Practices*, GAP) yang didasarkan atas SOP (*Standard Operational Procedures*) untuk masing-masing komoditas, panen dan pengolahan produk sesuai dengan GMP (*Good Manufacturing Practices*), sosialisasi dan pelatihan teknologi, serta bantuan investasi permodalan.

Areal pengembangan tanaman obat sampai tahun 2010 masih diarahkan ke lokasi di mana industri obat tradisional berkembang, yaitu di Pulau Jawa, dengan target luas areal 1.276 ha untuk temulawak, 1.527 ha kunyit, 3.270 ha kencur, 7.124 ha jahe dan 154 ha purwoceng. Dengan asumsi produktivitas per tahun rata-rata 7-8 ton/ha, maka target produksi temulawak sampai tahun 2010 diperkirakan mencapai 14.020 ton, kunyit 15.426 ton, kencur 26.290 ton, jahe 63.967 ton, dan purwoceng 850 ton. Kecuali ada permintaan khusus, setelah 2010 areal pengembangan temulawak, kunyit, kencur, jahe dan purwoceng dapat diperluas ke luar Pulau Jawa yang ketersediaan lahan lebih luas.

Teknologi budidaya dan pascapanen temulawak, kencur, kunyit, jahe dan purwoceng, telah tersedia. Namun teknologi tersebut belum semuanya diadopsi oleh petani, mengingat proses didalam pengalihan teknologi kepada petani memerlukan investasi yang cukup tinggi. Karena keterbatasan modal, petani belum mampu mengadopsi teknologi tersebut.

Kebutuhan investasi usaha agribisnis mencakup usaha agribisnis hulu, pertanian primer, agribisnis hilir dan pemerintah tahun 2005-2010 untuk temulawak mencapai Rp. 1.652,470 miliar, kunyit Rp. 1.373,944 miliar, kencur Rp. 6.287,586 miliar, jahe Rp. 12.004,040 miliar, dan purwoceng Rp. 34,700 miliar. Total investasi gabungan dari usaha agribisnis dan pemerintah untuk lima komoditas tanaman obat beserta produk turunannya adalah Rp. 21.744,92 miliar.

Guna membangun agribisnis dan agroindustri berbasis tanaman obat yang kuat, mandiri dan berdaya saing untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia perlu disusun Program Nasional Pengembangan Obat Bahan Alam, yang ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait. Target program tersebut adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen nomor satu di dunia dalam industri obat berbasis bahan alam (*world first class herbal medicine country*) pada tahun 2020.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut maka perlu disusun *Grand Strategy* Pengembangan Tanaman Obat Indonesia yang merupakan bagian dari Program Nasional tersebut, yang meliputi: 1) penetapan komoditas tanaman obat unggulan, 2) penetapan wilayah pengembangan tanaman obat unggulan, 3) peningkatan produksi, mutu dan daya saing komoditas tanaman obat unggulan, 4) peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, 5) pengembangan infrastruktur dan kelembagaan, 6) peningkatan pelayanan informasi, promosi dan pemasaran, dan 7) penyusunan kebijakan perpajakan dan insentif investasi yang kondusif di sub sistem hulu sampai hilir dalam agribisnis dan agroindustri berbasis tanaman obat.

Program yang dibutuhkan untuk pengembangan tanaman obat unggulan tersebut adalah: 1) penetapan wilayah pengembangan tanaman obat unggulan berdasarkan potensi, kesesuaian lahan dan agroklimat, sumberdaya manusia dan potensi serapan pasar; 2) peningkatan produksi, mutu dan daya saing komoditas tanaman obat unggulan; 3) peningkatan produksi produk turunan dari tanaman obat unggulan serta bentuk industri pengolahannya yang dapat memacu ekonomi rakyat dan pedesaan; 4) peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; 5) pengembangan infrastruktur dan kelembagaan; 6) peningkatan pelayanan informasi, promosi dan pemasaran; 7) penyusunan kebijakan perpajakan dan insentif investasi yang kondusif di sub sistem hulu sampai hilir dalam agribisnis dan agroindustri berbasis tanaman obat; dan 8) pembentukan data base tanaman obat yang valid, meliputi jenis tanaman, luas areal, produksi, jumlah petani yang terlibat, serapan, jumlah industri yang terlibat, ekspor, impor, yang akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan program nasional pengembangan tanaman obat.

Dukungan kebijakan yang dibutuhkan untuk pengembangan obat bahan alami antara lain: 1) keputusan politik pemerintah untuk menetapkan penggunaan obat bahan alami yang bahan bakunya antara lain tanaman obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan formal; 2) amandemen

serta revisi undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang belum sejalan dengan keputusan politik sebagaimana tersebut pada butir 1; 3) penyusunan program nasional pengembangan obat bahan alam berbasis tanaman obat asli Indonesia (temulawak, kunyit, kencur, jahe dan purwoceng) secara terpadu, yang melibatkan semua pihak terkait dari hulu sampai hilir; 4) mendirikan badan atau institusi khusus yang memiliki otoritas memadai yang akan merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan program nasional sebagaimana tersebut pada butir 3; 5) membangun dan melengkapi sarana dan prasarana pendukung : a) universitas yang akan mendidik tenaga medis untuk pelayanan kesehatan dengan obat bahan alami, b) rumah sakit dan apotek yang melayani masyarakat dengan obat bahan alami, c) jalan, transportasi dan telekomunikasi ke daerah-daerah sentra produksi tanaman obat, d) bantuan modal untuk petani dan pengusaha yang akan berusaha dalam agribisnis dan agroindustri berbasis tanaman obat (temulawak, kunyit, kencur, jahe dan purwoceng) baik di hulu maupun di hilir; dan 6) fasilitasi munculnya iklim usaha dan kemitraan yang sinergis dengan prinsip *win-win* diantara para pelaku agribisnis dan agroindustri berbasis obat bahan alam di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Menteri Pertanian	i
Kata Pengantar	iii
Tim Penyusun	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	x
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KONDISI SAAT INI	3
A. Usaha Pertanian Primer	4
B. Usaha Agribisnis Hulu	5
C. Usaha Agribisnis Hilir	6
D. Pasar dan Harga	7
E. Infrastruktur dan Kelembagaan	10
F. Kebijakan Harga, Perdagangan dan Investasi	11
III. PROSPEK, POTENSI, DAN ARAH PENGEMBANGAN	12
A. Prospek Pasar dan Pesaing	12
B. Potensi Lahan	12
C. Arah Pengembangan Tanaman Obat.....	15
IV. TUJUAN DAN SASARAN	24
A. Tujuan	24
B. Sasaran	24
V. KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM	25
A. Kebijakan	25
B. Strategi	25
C. Program	26

VI.	KEBUTUHAN INVESTASI	28
	A. Usaha Pertanian Primer	28
	B. Usaha Agribisnis Hulu	31
	C. Usaha Agribisnis Hilir	31
	D. Investasi Pemerintah	33
	E. Infrastruktur	36
VII.	DUKUNGAN KEBIJAKAN	39